

NASKAH PUBLIKASI

**PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN, NIAT
MEMBAYAR PAJAK DAN PENGETAHUAN PERATURAN PERPAJAKAN
TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

(Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Bantul)

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Derajat Sarjana pada Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Disusun oleh:

RIZA LESTARI

20150420114

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2018

**PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN, NIAT
MEMBAYAR PAJAK DAN PENGETAHUAN PERATURAN PERPAJAKAN
TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

(Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Bantul)

Riza Lestari¹. Andan Yuniyanto²

Program Studi Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

E-mail : rizalestari15@gmail.com

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, niat membayar pajak, dan pengetahuan peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Objek penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di kantor pelayanan pajak (KPP) pratama bantul. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dan didapat sampel sebanyak 150. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda melalui *statistic packege for the social sciences (SPSS)*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, niat membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan peraturan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: *Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Niat Membayar Pajak, Pengetahuan Peraturan Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak.*

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of modernization of its administrative HR system of taxation, tax mmebayar, intentions and knowledge of taxation taxpayer compliance against a private person. The object of this study is the tax payers private tedaftar person in the tax service Office (KPP) pratama bantul. The technique of sampling in this research is purposive sampling and obtained samples as much as 150. Analytical tools used in this study is the analysis of multiple linear regression statistics through packege for the social sciences (SPSS).

The results of this research show that: modernization of tax administration systems of positive effect significantly to taxpayer compliance, intention to pay taxes a positive effect against a compliance by tax payers, knowledge of regulations significant positive effect of taxation against taxpayer compliance.

Keywords: *Modernization Of Tax Administration System, The Intention To Pay Taxes, Taxation Knowledge And Taxpayer Compliance.*

Pendahuluan

Pajak merupakan penopang pendapatan nasional terbesar di Indonesia. Menurut Kementerian Keuangan 2017 penerimaan perpajakan pada APBN 2017 mencapai 85,6% dari total pendapatan. Menurut pasal 1 Undang-undang nomor 16 tahun 2009 atas perubahan ke empat dari Undang-Undang nomor 6 tahun 1993 yaitu tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dan tidak memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.

Reformasi perpajakan ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan aparat pemerintah dapat meningkatkan tanggung jawab sehingga tidak terdapat kecurangan sehingga dapat melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Dalam perpajakan saat ini terdapat program reformasi informasi administrasi perpajakan dimana dapat diwujudkan dengan modernisasi system perpajakan agar mempermudah para wajib pajak dalam membayarkan dan melaporkan pajak.

Sistem administrasi perpajakan saat semakin modern dalam mengikuti kemajuan teknologi dengan melakukan pelayanan yang berbasis E-sistem seperti e-SPT, e-Filing, e-Payment dan e-Registration. Berdasarkan artikel yang terdapat ada dalam modernisasi ini masih belum banyak masyarakat luas yang menerapkannya sehingga Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan menerapkan sistem tersebut

kepada para Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, dan Polri untuk segera menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi, Kewajiban ini sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 8 Tahun 2015.

Berdasarkan penelitian rahayu lingga (2009) menunjukkan bahwa system administrasi perpajakan modern tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan sedangkan penelitian Lasnofa Fasmi Fauzan Misra (2013) menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Niat merupakan keinginan atau dorongan dari dalam diri seseorang untuk melakukan tindakan. Dengan adanya niat yang dimiliki wajib pajak, maka secara tidak langsung akan mempengaruhi kemauan wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak. Konsep dari kemauan membayar ini sendiri merupakan suatu keadaan dimana seseorang rela untuk mengeluarkan dan mengorbankan uangnya untuk memperoleh sesuatu barang atau jasa yang diinginkan (Violita, 2015).

Niat wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam pemungutan pajak. Menurut Castrio (2016) wajib pajak mempunyai niat baik untuk menyiapkan segala dokumen-dokumen yang diperlukan untuk membayar pajak, melakukan pembayaran pajak tanpa adanya paksaan dari pihak lain, mengalokasikan sebagian dana dari penghasilannya untuk membayar pajak

dan melakukan pembayaran pajak atas kemauan diri sendiri dan tanpa adanya paksaan dari orang lain.

Pemahaman peraturan perpajakan merupakan suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan serta undang-undang dan tata cara perpajakan perpajakan dan menerapkannya dalam melakukan kegiatan perpajakan seperti membayar pajak, menelpon SPT, dll. Suryadi (2006) dan Hardiningsih (2011) dalam penelitiannya menyatakan bahwa meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal dan non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Menurut peneliti (Hariyanto, 2006 dalam Hardiningsih, 2011) menemukan bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pengetahuan wajib pajak serta persepsi tentang pajak dan petugas pajak yang masih rendah.

Sebagian Wajib Pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu ada yang memperoleh dari media informasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak. Rahadi (2014) menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 74/PMK.03/2012 kriteria kepatuhan Wajib Pajak adalah: 1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan. 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak. 3) Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik

atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut turut 4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *cross sectional* dengan cara mengisi kuisioner. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* yang berjumlah 150 responden dari wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak (KPP) pratama Bantul. Analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan model kuadrat terkecil yang berguna untuk menganalisis pengaruh faktor independen (X) terhadap variabel dependen (Y).

Hasil Penelitian

1. Analisis regresi linier berganda

Tabel 1 Berdasarkan tabel 4.1 dari 200 kuesioner yang disebar, hanya 175 kuesioner yang kembali. Dari kuesioner yang kembali tidak semuanya dapat diolah. Sehingga kuesioner yang dapat diolah sebanyak 150 kuesioner.

Tabel 4.1

	Offline	Online
Kuesioner Yang Disebar	150	50

Kuesioner Kembali	148	39
Kuesioner Yang Dapat Diolah	120	30

Tabel 4.2 Frekuensi Data Demografi Berdasarkan jenis kelamin (N=150)

Tabel 4.2
Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

		Frequency	Percent
Valid	Laki-laki	81	54%
	Perempuan	69	46%
Total		150	100.0

Berdasarkan tabel 2 mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki (54 %)

Tabel 4.3 Frekuensi Data Demografi Berdasarkan usia (N=150)

Tabel 4.3
Responden Berdasarkan Usia

No.	Usia	Jumlah	Persentase (%)
1.	20-30 tahun	59	39%
2.	31-40 tahun	55	37%
3.	41-50 tahun	22	15%
4.	>50 tahun	14	9%

Tabel 4.4 Frekuensi Data Demografi Berdasarkan jenjang pendidikan (N=150)

Tabel 4.4
Responden Berdasarkan Jenis Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1.	SD	0	0%
2.	SMP	0	0%
3.	SMA	53	35%
4.	Diplomat	10	7%

5.	Sarjana	81	54%
6.	Pasca	6	4%

Tabel 4.5 Frekuensi Data Demografi Berdasarkan pekerjaan (N=150)

Tabel 4.5
Responden berdasarkan pekerjaan

No.	Pendapatan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Wiraswasta	38	25%
2.	BUMN	25	17%
3.	Pekerja Bebas	12	8%
4.	Pedagang	17	11%
5.	Petani	6	4%
6.	PNS	36	24%
7.	Dll	16	11%

Tabel 4.6
Statistik Deskriptif

Keterangan	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Modernisasi sistem administrasi perpajakan	150	14	25	20,37	2.209
Niat membayar pajak	150	12	20	17,70	1.427
Pengetahuan peraturan perpajakan	150	16	25	21.14	2.010
Kepatuhan wajib pajak	150	30	45	38.00	3.295

Hasil statistik pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa N = 150. Untuk variabel modernisasi (M) memiliki nilai minimum 14, nilai maksimum 25, nilai *mean* 20,37 , dan standar deviasi 2,209. Variabel niat membayar (N) memiliki nilai minimum 12, nilai maksimum 20, nilai *mean* 17,70, dan standar deviasi 1,427. Variabel pengetahuan pertauran perpajakan (P) memiliki nilai minimum 16, nilai maksimum 25, nilai *mean* 21,14, dan

standar deviasi 2,010. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (K) memiliki nilai minimum 30, nilai maksimum 45, nilai *mean* 38,00 dan standar deviasi 3,295.

Tabel 4.7

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,374 ^a	,140	,122	3,088	1,975

Nilai koefisien determinasi pada tabel 4.12 adalah 0,122 atau 12,2%. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan, niat membayar pajak dan pengetahuan peraturan perpajakan 12,2 % sedangkan sisanya sebesar 87,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dilakukan pada penelitian ini.

Tabel 4.8
Hasil Uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	226,186	3	75,395	7,909	,000 ^b
Residual	1391,814	14	9,533		
Total	1618,000	14			

a. Dependent Variable: TOTAL_K

b. Predictors: (Constant), TOTAL_P, TOTAL_N, TOTAL_M

Berdasarkan pada tabel 4.13 maka diketahui bahwa nilai signifikansinya $0,000 < 0,05$ sehingga hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_1

diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan (M), niat membayar pajak (N) dan pengetahuan peraturan perpajakan (P) berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak (K).

Tabel 4.9

Hasil uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	
1 (Constant)	18,275	4,116	,000
TOTAL_M	,181	,122	,014
TOTAL_N	,475	,179	,009
TOTAL_P	,361	,134	,008

Tujuan uji ini untuk mencari tahu pengaruh variabel independen secara parsial menjelaskan variasi variabel dependen. Pengujian ini dapat dilihat dengan menggunakan tingkat signifikansi ($\alpha=5\%$). Kriteria hipotesis diterima bila nilai signifikansi $< \alpha$ dan koefisien regresi searah dengan arah hipotesis

Pembahasan

1. Karakteristik Responden

a. Jenis Kelamin

Menurut tabel 4.1 menunjukkan bahwa karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin sebagian besar responden adalah laki-laki. Hal ini dikarenakan wajib pajak di kantor pelayanan pajak pratama bantul mayoritas laki-laki.

b. Berdasarkan usia

Berdasarkan tabel 4.3 maka dapat diketahui bahwa untuk responden dengan usia 20 – 30 tahun berjumlah 59 orang atau 39% dari total jumlah responden. Sedangkan untuk responden dengan rentang usia antara 31 – 40 tahun

berjumlah 55 orang atau 37%. Untuk responden dengan usia antara 41 – 50 tahun terdapat 22 orang atau 15%. Dan untuk responden dengan usia 50 tahun ke atas berjumlah 14 orang atau 9%.

c. Berdasarkan pendidikan

Karakteristik responden berdasarkan pendidikannya terdiri dari 6 kelompok yaitu, SD, SMP, SMA, Diplomat, Sarjana dan Pasca. Berdasarkan pendidikannya responden dalam penelitian paling banyak adalah sarjana. Responden dengan pendidikan sarjana sebanyak 81 Orang atau 54 % dari total responden. Sedangkan untuk SD dan SMP adalah sebanyak 0. Kemudian untuk tingkat diplomat sebanyak 10 orang atau 7% dan untuk tingkat pascasarjana sebanyak 6 orang atau 4% dari jumlah total responden yang dilakukan dalam penelitian ini.

d. Berdasarkan pekerjaan

Responden berdasarkan pekerjaan mayoritas responden adalah wirausaha sebanyak 38 dengan persentase 25%. Responden yang PNS sebesar 36 orang dengan persentase 24% dari total jumlah responden. Sedangkan untuk yang bekerja sebagai BUMN sebanyak 25 orang atau 17%. Kemudian untuk responden yang Pekerja Bebas adalah 12 orang atau 8% dari total responden yang dilakukan dalam penelitian. Kemudian untuk responden yang Berdagang adalah 17 orang atau 11% dari total responden yang dilakukan dalam penelitian. Kemudian untuk responden yang Bertani adalah 6 orang atau 4 % dari total responden yang dilakukan dalam penelitian, Dan untuk responden yang memiliki pekerjaan lainnya adalah 16 orang atau 11% dari total responden yang dilakukan dalam penelitian.

2. Gambaran hasil penelitian

a. Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Nilai signifikan variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan (M) terhadap kepatuhan Wajib Pajak (K) adalah 0,014 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan (M) berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak (K). Nilai koefisien beta dari modernisasi sistem administrasi perpajakan (M) adalah 0,181 (positif) yang berarti variabel tersebut memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak (P). Melalui hasil tersebut diketahui modernisasi sistem administrasi perpajakan (M) berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak (K). Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H_1) **diterima**.

b. Pengaruh Niat membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Nilai signifikan variabel niat membayar pajak (N) terhadap kepatuhan Wajib Pajak (K) adalah 0,009 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa niat membayar pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak (K). Nilai koefisien beta dari niat membayar pajak (N) adalah 0,475 (positif) yang berarti variabel tersebut memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak (K). Melalui hasil tersebut diketahui niat membayar pajak (N) berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak (K). Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H_2) **diterima**.

- c. Pengaruh Pengetahuan peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Menambah variabel yang terindikasi mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti pelayanan fiskus.

Nilai signifikan variabel pengetahuan peraturan perpajakan (P) terhadap kepatuhan Wajib Pajak (K) adalah 0,008 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan peraturan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak (K). Nilai koefisien beta dari pengetahuan peraturan perpajakan (P) adalah 0,361 (positif) yang berarti variabel tersebut memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak (K). Melalui hasil tersebut diketahui pengetahuan peraturan perpajakan (P) berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak (K). Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H_3) **diterima**.

Kesimpulan

1. Hasil penelitian pada hipotesis pertama yakni, modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.
2. Hasil penelitian pada hipotesis kedua yakni, niat membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.
3. Hasil penelitian pada hipotesis ketiga yakni, pengetahuan peraturan perpajakan berpengaruh positif

Saran

1. Memperluas daerah pengamatan, yaitu tidak hanya berfokus pada kabupaten bantul, agar penelitian lebih luas dan dapat melengkapi hasil penelitian di daerah lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyadi, Achmad Dwi, 2015, "Kepatuhan Pajak Indonesia Masih Rendah", Diakses dari <http://bit.ly/ITFUDI2>
- Agustini Eka Pratiwi W, P., & Supadmi, N. L. 2016. "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak". *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol.15 No. 1.Hal 27-54.*
- Alikin, J. L. 2016. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Wajib Pajak Untuk Menggunakan E-Filing Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut". *Skripsi. Surabaya: Universitas Katolik Widya Mandala.*
- Aminah, S. 2014. "Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Surakarta". *Doctoral dissertation. Universitas Muhammadiyah Surakarta.*
- Anggraini, F., & Waluyo. 2014. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Kebayoran Baru Tiga)". *E-Journal Magister Akuntansi Trisaksi, Vol. 1 No. 1.*
- Aryobimo, Putut Tri, 2012, Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak dan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang), *Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Semarang: Universitas Diponegoro.*
- Budileksmana, A. 2001. "Pemeriksaan Pajak Sebagai Upaya Untuk Mendorong Kepatuhan Wajib Pajak". *Jurnal Akuntansi dan Investasi Vol. 2 No. 1 Januari 2001 ISSN: 1411-6227*
- Dedi. 2009. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". *Skripsi: Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.*
- Devano et al. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu.* Jakarta: Kencana.
- Dewi P V, suajana E dan yasa I N P, 2017, " Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak Dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris Pada Koperasi Di Kota Banda Aceh)" *E-jurnal Jurnal Megister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Volume 6, No. 3, Agustus 2017 ISSN 2302-0164.*
- Direktorat Jenderal Pajak. 2015. Kinerja Kementerian Keuangan Terbaik di Pemerintahan. [http://www.pajak.go.id/content/new/s/kinerja-kementerian-keuangan-terbaik-di-pemerintahan.](http://www.pajak.go.id/content/new/s/kinerja-kementerian-keuangan-terbaik-di-pemerintahan)
- Eka Susilawati, Amelia Sandra, 2017 "Pengaruh Pengetahuan Tentang Peraturan Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Pajak Terhadap

- Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Di Kecamatan Pulo Gadung” *jurnal akuntansi Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika*, Volume 6 No. 1 Februari 2017, ISSN : 2089-7219.
- Fatmawati. 2016. “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor“. *Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Hadi, Wiyoso, 2012, “Bagaimana ya Cara Terbaik Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak?”, Diakses dari <http://bit.ly/1OxqEY5>
- I Ni Luh Arismayani, I Gede Adi Yuniarta, I Nyoman Putra Yasa. 2017 “ pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, Motivasi Wajib Pajak, Dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Hukum Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1* Vol:8 No:2 Tahun 2017.
- Jatmiko, Agus Nugroho, 2006, Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang), *Tesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Semarang: Universitas Diponegoro*.
- Jatmiko, Nugroho Agus. 2006. “Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. *Tesis: Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro*.
- Jotopurnomo, Cindy dan Yenni Mangoting, 2013, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya”, *Tax & Accounting Review*, Vol 1, No 1.
- Julianti, Murni, 2014, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Membayar Pajak Dengan Kondisi Keuangan Dan Preferensi Risiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Candisari Semarang), *Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kepatuhan, 1988
- Lasnofa Fasmi, fauzan misra, 2013, “pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak di kantor pelayanan pajak (KPP) pratama padang”, *Simposium nasional akuntansi*.
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi offset

- Muliari dan Putu Ery Setiawan. 2010. "Pengaruh Presepsi tentang Sanki Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur". *Tesis: Universitas Udayana*.
- Putri Savilla, Moch. Dzulkhirom A.R, Zahroh Z.A 2018 "Pengaruh Administrasi Perpajakan Dan Sumber Daya Manusia Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di Kpp Pratama Malang Selatan)" *Jurnal Administrasi Bisnis, (JAB) universitas brawijaya*, Vol. 55 No. 3 Februari 2018.
- Putu Rara Susmit, Ni Luh Supadmi, 2016 "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Wajib Pajak, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.14.2 Februari (2016). 1239-1269 ISSN: 2302-8556.
- Putu Vita Dewi, Edy Sujana, I Nyoman Putra Yasa, 2017 "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Niat Membayar Pajak, Dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dan Restoran (Studi Empiris Pada Hotel Dan Restoran Di Kabupaten Bangli)" *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI*, Vol: 8 No: 2 Tahun 2017.
- Sri Rahayu, Ita Salsalina Lingga, 2009 "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei atas Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung "X")" *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi-Univ.Kristen Maranatha* Vol.1 No.2 November 2009:119-138.
- Undang Undang Perpajakan Nomor 28 Tahun 2008 Tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Widya K Sarunan, 2015, "Pengaruh Modernisasi Sistem Administratif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado", *jurnal EMBA Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado*, Vol.3 No.4 Desember 2015, Hal. 518-526 ISSN 2303-1174

